

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah *Agency Theory*. Jansen & Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah pengaturan kontraktual di mana individu (prinsipal) memberikan wewenang kepada individu lain (agen) untuk melakukan layanan dan membuat keputusan atas nama prinsipal.

Agency Theory menjelaskan interaksi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada agen untuk mengelola dana serta menyediakan layanan publik yang memadai. Melalui perspektif teori keagenan, kita juga dapat menganalisis berbagai masalah yang muncul akibat hubungan keagenan tersebut.

Teori keagenan ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nias. Dalam menjalankan kepentingannya, masyarakat (prinsipal) mempekerjakan pemerintah (agen) untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang optimal demi kemajuan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi harapan mereka.

Teori keagenan telah diterapkan, termasuk dalam konteks pemerintah daerah yang berupaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah, sebagai agen, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan kepada pengguna informasi, yang berperan sebagai prinsipal, agar mereka dapat menilai akuntabilitas dan membuat keputusan terkait aspek ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka. Dalam konteks pemerintahan demokratis, teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi dari laporan keuangan pemerintah (Wulan D, dkk 2020) dalam (Khikmah et al., 2024).

Teori keagenan dalam organisasi sektor publik menjelaskan bahwa pemerintah, sebagai agen yang memegang amanah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengungkapan atas semua aktivitas yang dilakukannya. Ini termasuk pemantauan sumber keuangan dari pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat, yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut (Zubaidah & Nugraeni, 2023).

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari sistem akuntansi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan ini berperan sebagai media untuk menyampaikan data keuangan serta sebagai alat evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan (Rohman et al., 2020) dalam (Khikmah et al., 2024). Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu para pemangku kepentingan dalam membuat

keputusan yang lebih baik dan berkualitas (AgustiningTyas et al., 2020) dalam (Khikmah et al., 2024).

Agar laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, diperlukan laporan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang harus ada dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Setelah entitas menyusun laporan keuangan, penting untuk melakukan pemeriksaan ulang melalui audit laporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 1 Tahun 2019, audit laporan keuangan adalah proses yang mencakup identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi terkait tugas dan fungsi instansi pemerintah. Melalui proses audit ini, auditor akan memberikan pernyataan profesional berupa opini.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan auditor terkait kewajaran informasi yang disajikan, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 700, opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar

dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan tersebut harus disampaikan kepada gubernur, bupati, atau walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang kemudian akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam hal penamaan dinas atau badan di provinsi, kabupaten, dan kota, telah terjadi perubahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, istilah yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang kemudian berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Perubahan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya disusun oleh perusahaan untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga oleh entitas pemerintahan daerah untuk menilai kinerja pemerintahan.

Berikut adalah komponen laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

1. *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*

Laporan ini menyajikan ringkasan tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, serta menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)*

Laporan ini memberikan informasi mengenai perubahan, baik kenaikan maupun penurunan, pada Saldo Anggaran untuk tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. *Neraca*

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. *Laporan Operasional (LO)*

Laporan ini menyajikan ringkasan mengenai sumber daya ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. *Laporan Arus Kas (LAK)*

Laporan ini menyajikan informasi mengenai kas yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori, serta menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

6. *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)*

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, baik kenaikan maupun penurunan, untuk tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*

Catatan ini berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh laporan keuangan yang berkualitas:

1. *Relevan*

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam menilai peristiwa yang terjadi saat ini atau di masa lalu, meramalkan masa depan, serta memvalidasi atau merevisi pandangan yang telah ada sebelumnya.

2. *Andal*

Data dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, bebas dari kesalahan signifikan dan interpretasi yang menyesatkan, serta dapat diverifikasi.

3. *Dapat dipahami*

Isi laporan keuangan harus disampaikan dengan istilah atau kosakata yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna, sehingga mereka dapat dengan mudah memahaminya.

4. *Dapat dibandingkan*

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi dari organisasi lain atau dengan periode sebelumnya.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan peran aktif dari sumber daya manusia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sedangkan menurut (Sulistyowati, 2021), sumber daya manusia adalah individu yang bekerja di suatu instansi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai potensi individu yang dapat dikembangkan dalam suatu organisasi untuk berfungsi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam proses produksi, dengan tujuan mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Keputusan terbaik yang diambil oleh sumber daya manusia mencerminkan kinerja individu serta kemampuannya dalam menganalisis masalah yang ada dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun, hal ini juga bergantung pada ketelitian dan keakuratan dalam menentukan penempatan seorang pegawai pada pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu mungkin akan lebih efektif jika ditempatkan di bidang yang sesuai.

Selain memerlukan sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, entitas pemerintahan daerah juga membutuhkan kompetensi dari sumber daya manusia tersebut. Hal ini karena kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang secara langsung memengaruhi kinerja individu (Dewi & Shinta, 2020). Selain itu, menurut (Setyaningtyas et al., 2020), kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Dengan adanya kompetensi ini, proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.

Kompetensi sumber daya manusia perlu diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Nias, karena kompetensi ini memiliki keunggulan dalam membantu pengelolaan keuangan sumber daya daerah Kabupaten Nias dengan cermat, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini bertujuan agar sumber daya daerah Kabupaten Nias dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten di organisasi perangkat daerah Kabupaten Nias, tujuan perencanaan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga dana daerah dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu, kompetensi ini juga dapat merancang pembangunan dengan skala jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah Kabupaten Nias berpengaruh dalam membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah daerah serta mendukung kemakmuran masyarakat setempat.

2.1.5 Transparansi Keuangan

Transparansi adalah penyediaan akses kepada masyarakat terhadap informasi keuangan yang akurat dan jelas. Hal ini penting karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Erlina et al., 2015) dalam (Khikmah et al., 2024) Transparansi keuangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi landasan bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditor, dan regulator, untuk mengambil keputusan yang tepat.

Menurut Rusdiana & Nasihudin (2018) dalam (Zubaidah & Nugraeni, 2023), transparansi juga berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat, dengan keyakinan bahwa mereka berhak mengetahui secara menyeluruh tentang pengelolaan sumber daya oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, yang akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Transparansi keuangan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang dikelola. Hal ini berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika laporan keuangan daerah disajikan dengan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Masyarakat yang merasa memiliki akses terhadap informasi keuangan yang jelas cenderung lebih percaya bahwa pemerintah mengelola sumber daya dengan baik. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Transparansi yang tinggi dalam laporan keuangan daerah dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan penyimpangan. Ketika informasi keuangan dapat diakses dan diperiksa oleh berbagai pihak, kemungkinan manipulasi data dan

penyimpangan dari standar akuntansi akan berkurang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, transparansi keuangan harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya keterbukaan dari suatu entitas pemerintah, kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban terkait penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan dapat terbangun. Oleh karena itu, prinsip transparansi yang diterapkan dalam organisasi publik sangat penting. Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI), prinsip transparansi mencakup hal-hal berikut:

1. Tersedianya informasi yang dapat dipahami dan diakses, seperti jumlah dana, cara pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan.
2. Adanya publikasi dan peran media dalam mendokumentasikan proses kegiatan dan rincian keuangan.
3. Pelaporan secara berkala mengenai penggunaan atau efektivitas sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh publik.
4. Penyediaan laporan tahunan yang dipublikasikan.

5. Tersedianya website atau media publikasi organisasi.

6. Adanya pedoman atau peraturan untuk penyebaran informasi

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, baik di suatu entitas maupun di instansi pemerintah, diperlukan pengendalian internal untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang menyeluruh yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Proses ini mencakup kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati/walikota diwajibkan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengendalian tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, indikator sistem pengendalian internal pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendukung perilaku positif dan penerapan sistem pengendalian internal di tempat kerja. Hal ini dilakukan melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang mendukung
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik terkait pengelolaan sumber daya manusia
- Peran efektif aparat pengawasan internal pemerintah
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah lainnya.

Lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian internal harus menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang mencakup identifikasi dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan harus menetapkan:

- Tujuan instansi pemerintah
- Tujuan pada tingkat kegiatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Identifikasi risiko
- Analisis risiko
- Pengelolaan risiko selama perubahan.

Penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal dilakukan dengan menetapkan batasan dan toleransi terhadap risiko yang diidentifikasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas serta fungsi instansi. Kegiatan pengendalian harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Fokus pada kegiatan utama instansi pemerintah
- Terkait dengan proses penilaian risiko
- Disesuaikan dengan karakteristik khusus instansi
- Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis

- Prosedur yang ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

- Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.

Kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan pengendalian internal dan manajemen risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dengan cara dan waktu yang tepat. Komunikasi informasi harus dilakukan secara efektif, yang mencakup:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan

- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem komunikasi secara berkelanjutan.

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi untuk menjalankan tanggung jawab.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan dilakukan melalui:

- Pemantauan berkelanjutan: Melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- Evaluasi terpisah: Melalui penilaian mandiri, tinjauan, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal atau pihak eksternal. Evaluasi ini dapat menggunakan daftar uji pengendalian internal.
- Penyelesaian audit/tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan tinjauan lainnya: Harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit dan tinjauan lainnya.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan sistem akuntansi yang memungkinkan audit dan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pimpinan.

2.1.7 Kecerdasan Spiritual

Zohar dan Marshall (2000) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber daya spiritual dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Zohar dan Marshall juga menekankan bahwa kecerdasan spiritual dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, termasuk dalam konteks pekerjaan dan hubungan interpersonal. Mereka berargumen bahwa

individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik cenderung lebih mampu beradaptasi, lebih empatik, dan memiliki integritas yang lebih tinggi.

Kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient/SQ) merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek spiritual dalam kehidupan, yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan makna hidup. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, kecerdasan spiritual menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku etis aparatur negara, termasuk dalam menyusun laporan keuangan yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab.

Penelitian Hage dan Posner yang dikutip dalam Nursin et al. (2022) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual sangat penting dalam membentuk pemimpin yang beretika. Pemimpin atau pegawai yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi akan cenderung bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.

Kecerdasan spiritual membantu individu dalam:

- Mengambil keputusan berdasarkan nilai moral, bukan hanya logika ekonomi.
- Meningkatkan etika, tanggung jawab, dan integritas dalam pelaporan keuangan.
- Menjaga konsistensi perilaku etis dalam kondisi tekanan atau godaan penyimpangan.

- Meningkatkan kualitas kerja melalui makna dan kesadaran spiritual dalam tugas sehari-hari.

Dalam organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah, laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya adalah wujud dari akuntabilitas publik. Namun, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem, tetapi juga oleh karakter moral pembuatnya.

Kecerdasan spiritual memiliki peran sebagai penguat moral (moral anchor) dalam setiap proses pelaporan keuangan. Individu dengan kecerdasan spiritual tinggi lebih mampu:

- Menghindari praktik manipulasi data atau laporan fiktif, meskipun memiliki pengetahuan teknis (kompetensi SDM).
- Menolak tekanan politik atau birokrasi yang mendorong penyimpangan keuangan.
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas, karena menyadari tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Tuhan.

Dengan demikian, kecerdasan spiritual bukan hanya nilai pribadi, tetapi menjadi faktor penting yang memoderasi pengaruh kompetensi, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, kecerdasan spiritual digunakan sebagai variabel moderasi. Artinya, peran kecerdasan spiritual adalah memperkuat atau

memperlemah hubungan antara variabel bebas (X1, X2, X3) dan variabel terikat (Y).

1. Jika aparaturnya memiliki kompetensi tinggi namun rendah kecerdasan spiritual, maka potensi penyimpangan tetap ada.
2. Jika sistem pengendalian internal sudah berjalan, namun tanpa integritas individu, maka celah penyalahgunaan tetap mungkin terjadi.
3. Jika laporan sudah disusun tepat waktu, namun tidak berdasarkan niat baik dan moral, maka keandalannya tetap diragukan.

Oleh karena itu, kecerdasan spiritual bertindak sebagai penjaga nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam setiap proses keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu:

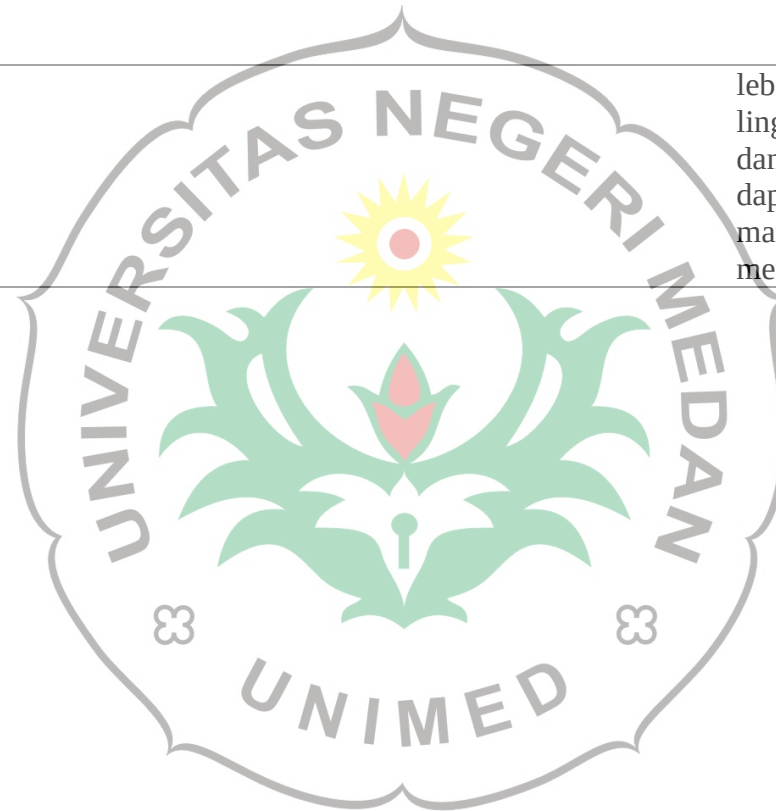
THE
Character Building
UNIVERSITY

Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Siti Umami Khikmah, Achmad Hizazi, Yudi (2024)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari)	Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Variabel Independen : Transparansi (X ₁), Akuntabilitas (X ₂), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₃), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₄)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Transparansi (X ₁)berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas(X ₂) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (X ₃) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia(X ₄) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni (2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Dependen :	1. Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Variabel Independen : Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2)	kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman.
3.	Violinda Dhina Widaningru dan Firda Zulfa Fahrani (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung	Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan (Y) Variabel Independen : Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Responsivitas (X_3)	Kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung secara simultan dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Secara parsial kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Namun, transparansi dan responsivitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
4.	Depianti Nursin, Syamsuddin, Nirwana (2022)	Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan	Variabel Dependen : Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) Variabel Independen : Kualitas SDM (X_1),	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan

		Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3), Variabel Moderasi : Kecerdasan Spiritual (Z)	desa dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Serta, kecerdasan spiritual tidak mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
5.	Fuad Rakhman dan Singgih Wijayana (2024)	<i>Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia</i>	Variabel Dependen : kualitas pelaporan keuangan di antara pemerintah daerah di Indonesia (Y) Variabel Independen : Pembangunan manusia (X)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan manusia dan ketiga dimensinya secara signifikan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan (FRQ). Investasi dalam pengembangan jangka panjang, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, berdampak langsung dan tidak langsung pada FRQ. Modal manusia yang berkualitas diperlukan untuk menghasilkan opini audit yang



lebih baik. Namun, dalam lingkungan kelembagaan yang lemah dan budaya korupsi, modal manusia dapat disalahgunakan untuk manajemen akrual, yang mengakibatkan ketidakjelasan.

THE
Character Building
UNIVERSITY

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono & Sutopo, 2021) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting. Kerangka ini menjelaskan bagaimana variabel yang akan diteliti saling terkait dan mencakup susunan logis dari proses penelitian, termasuk semua variabel yang terlibat. Kerangka berpikir berperan penting dalam merumuskan hipotesis, sehingga dapat dianggap sebagai dasar untuk pembentukan hipotesis tersebut. Selain itu, kerangka berpikir membantu peneliti dalam merinci masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, serta memberikan panduan dalam memilih metode dan teknik penelitian yang sesuai (Sugiyono, 2022).

Terdapat lima variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah, tiga variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal, dan satu variabel moderasi yaitu kecerdasan spiritual. Penelitian ini melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu. Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menambahkan transparansi keuangan sebagai variabel independen kemudian kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan saran dari peneliti terdahulu.

2.3.1 Pengaruh Sistem Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang secara langsung memengaruhi kinerja individu (Dewi & Shinta, 2020). Selain itu, menurut (Setyaningtyas et al., 2020), kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pegawai memiliki kompetensi yang memadai, mereka akan lebih mampu dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan dengan akurat dan transparan. Hal ini mencakup pemahaman yang baik tentang prinsip akuntansi, pengelolaan anggaran, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan demikian, kompetensi yang tinggi di kalangan sumber daya manusia akan berkontribusi pada pengurangan kesalahan dalam laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik. Kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang sehat, tetapi juga menciptakan transparansi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Nias.

2.3.2 Pengaruh Transparansi keuangan Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik, terutama di tingkat pemerintah daerah. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi keuangan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika informasi keuangan disajikan secara terbuka, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menilai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang tinggi akan mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Transparansi keuangan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi keuangan yang jelas dan akurat, mereka cenderung lebih percaya bahwa pemerintah mengelola sumber daya dengan baik. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kepercayaan publik yang tinggi akan mendorong pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih baik, karena mereka ingin mempertahankan reputasi dan dukungan dari masyarakat.

Transparansi yang tinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan penyimpangan. Ketika informasi keuangan dapat diakses dan diperiksa oleh berbagai pihak, kemungkinan manipulasi data dan penyimpangan dari standar akuntansi akan berkurang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, karena laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Transparansi keuangan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk melatih dan mengembangkan keterampilan pegawai dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Peningkatan kompetensi ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mencegah kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memungkinkan evaluasi dan umpan balik yang konstruktif. Oleh karena itu, transparansi keuangan harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintah daerah, SPI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern berfungsi untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Salah satu fungsi utama dari sistem pengendalian intern adalah untuk mengukur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran dana sumber daya daerah. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meminimalkan perilaku oknum di lingkungan OPD yang bertindak tidak bertanggung jawab terkait perjanjian atau tindakan yang telah dibuat.

Dengan adanya sistem pengendalian intern di organisasi pemerintah daerah, kejelasan arahan rencana kegiatan pembangunan yang telah disepakati dapat terjamin, sesuai dengan perhitungan waktu yang tepat. Sistem ini juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan oleh oknum pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab, karena setiap kegiatan akan diawasi

secara ketat oleh sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.3.4 Kecerdasan Spiritual Memoderasi Hubungan Sistem Kompetensi

Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek spiritual dalam hidupnya, yang mencakup nilai-nilai, etika, dan makna. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kecerdasan spiritual dapat berperan sebagai faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara sistem kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kualitas laporan keuangan.

Kecerdasan spiritual mendorong individu untuk memiliki nilai-nilai etika yang kuat dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Ketika SDM di pemerintah daerah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan jujur dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena laporan tersebut akan mencerminkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Kecerdasan spiritual juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. SDM yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi akan lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan kepentingan masyarakat. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kecerdasan spiritual membantu individu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan. SDM yang memiliki kecerdasan spiritual dapat mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka tidak hanya dari segi angka, tetapi juga dari segi moral dan etika. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, karena keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang lebih holistik.

Kecerdasan spiritual berperan penting sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara sistem kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan etika, motivasi, pengambilan keputusan, kerjasama, resiliensi, dan kepuasan kerja, kecerdasan spiritual dapat memperkuat dampak positif dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengembangan kecerdasan spiritual di kalangan SDM pemerintah daerah perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

2.3.5 Kecerdasan Spiritual Memoderasi Hubungan Transparansi keuangan

Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kecerdasan spiritual mendorong individu untuk memiliki nilai-nilai etika yang kuat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. SDM yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi cenderung lebih berkomitmen untuk mengungkapkan informasi keuangan secara jujur dan terbuka, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kecerdasan spiritual memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan aspek spiritual ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, karena mencerminkan integritas dan kejujuran.

Kecerdasan spiritual dapat meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan adanya transparansi, stakeholder seperti masyarakat dan lembaga pengawas akan lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan, yang dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Kecerdasan spiritual memberikan ketahanan bagi individu dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Dalam situasi sulit, SDM yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan tetap fokus pada nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, sehingga tetap berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Kecerdasan spiritual berfungsi sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam hubungan antara transparansi keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan etika, akuntabilitas, pengambilan keputusan, kepercayaan publik, keterlibatan stakeholder, dan resiliensi, kecerdasan spiritual dapat memperkuat dampak positif dari transparansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengembangan kecerdasan spiritual di kalangan SDM pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

2.3.6 Kecerdasan Spiritual Memoderasi Hubungan Sistem Pengendalian Internal Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dapat berfungsi sebagai faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian internal (SPI) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kecerdasan spiritual mendorong individu untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai etika dan moral. Dalam konteks sistem pengendalian internal, individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan lebih cenderung untuk mematuhi prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Mereka akan memahami pentingnya integritas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

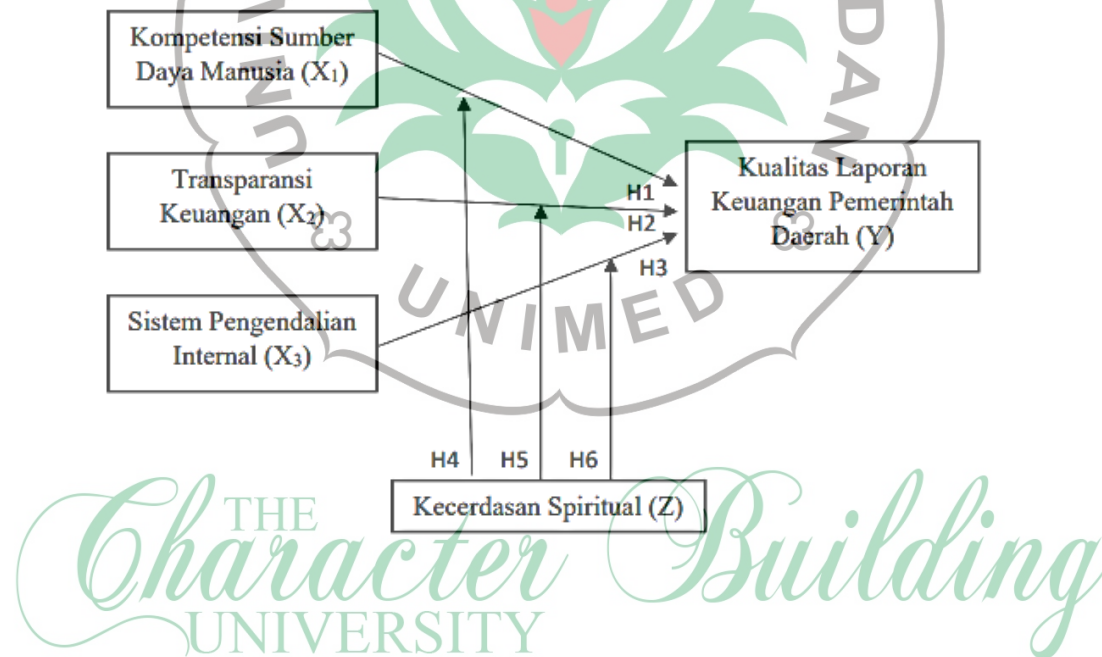
Individu dengan kecerdasan spiritual cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap tanggung jawab sosial. Mereka memahami bahwa laporan keuangan bukan hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan dampak dari

keputusan keuangan terhadap masyarakat. Dengan demikian, mereka akan lebih berusaha untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kualitas laporan.

Kecerdasan spiritual dapat meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses pengendalian internal. Pegawai yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Keterlibatan ini akan menghasilkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Kecerdasan spiritual berperan sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan kesadaran etika, komitmen terhadap tanggung jawab sosial, budaya organisasi, kemampuan menghadapi tekanan, inovasi, dan keterlibatan pegawai, kecerdasan spiritual dapat memperkuat dampak positif dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengembangan kecerdasan spiritual di kalangan pegawai pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan latar belakang, kerangka teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2022), hipotesis adalah sebuah proposisi yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Umumnya, hipotesis digunakan untuk menguji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan dari rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diformulasikan hipotesis penelitian ini, seperti yang berikut ini:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H₂ : Transparansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H₄ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimoderasi oleh kecerdasan spiritual

H₅ : Transparansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimoderasi oleh kecerdasan spiritual

H₆ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimoderasi oleh kecerdasan spiritual